

KESIAPAN PEMKAB BANGKA DALAM IMPLEMENTASI UU NO 23 TAHUN 2014

BUPATI BANGKA

**DISAMPAIKAN PADA RAKOR GUBERNUR DENGAN BUPATI/WALIKOTA
SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
MANGGAR, 7 MEI 2015**



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

UU 23 TAHUN 2014

- ◉ **PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN, KELAUTAN SERTA ESDM DIBAGI ANTARA PUSAT DAN PROVINSI**
- ◉ **9 SUB URUSAN KAB/KOTA YANG DILIMPAHKAN MENJADI KEWENANGAN PROVINSI ADALAH: PENDIDIKAN MENENGAH, TERMINAL PENUMPANG TIPE A DAN B, REHABILITASI DILUAR KAWASAN HUTAN NEGARA, PERLINDUNGAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN PRODUKSI, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KEHUTANAN, PENYULUHAN KEHUTANAN, PENYULUH/PETUGAS LAPANGAN KB, TENAGA PENGAWAS KETENAGAKERJAAN, PENYULUHAN PERIKANAN NASIONAL, PENYEDIAAN DANA UNTUK: KELOMPOK MASYARAKAT TIDAK MAMPU, PEMBANGUNAN SARANA TENAGA LISTRIK BELUM BERKEMBANG, DAERAH TERPENCIL DAN PERDESAAN**
- ◉ **1 SUB URUSAN PROVINSI YANG DILIMPAHKAN MENJADI KEWENANGAN KAB/KOTA ADALAH METROLOGI LEGAL (TERA, TERA ULANG DAN PENGAWASAN)**
- ◉ **KEWENANGAN PROVINSI DAPAT DISELENGGARAKAN SENDIRI OLEH PROVINSI, TUGAS PERBANTUAN KE KAB/KOTA ATAU MENUGASI DESA**

SE MENDAGRI 120/253/SJ

- PENYELESAIAN INVENTARISASI P3D SEBAGAI AKIBAT PENGALIHAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN PALING LAMBAT 31 MARET
- SERAH TERIMA PERSONEL, SARANA DAN PRASARANA SERTA DOKUMEN (P2D) PALING LAMBAT 2 OKTOBER 2016
- HASIL INVENTARISASI P3D MENJADI DOKUMEN DAN DASAR PENYUSUNAN RKPD, KUA/PPAS DAN RAPERDA APBD PROV/KAB/KOTA 2017

KESIAPAN KAB. BANGKA

URUSAN	INVENTARISASI P3D	SARAN	KETERANGAN
KEHUTANAN	POLHUT 4 ORG, PENYULUH 2 ORG, PENGAMAT EKOSISTEM 2 ORG, PERALATAN DAN DOKUMEN KEHUTANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. DIBENTUK UPT/KPHP 2. TAHUN 2016, PROVINSI MEMBIYAI PELAKSANAAN REHABILITASI DILUAR KAWASAN HUTAN NEGARA, PERLINDUNGAN HUTAN LINDUNG DAN HUAN PRODUKSI, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENYULUHAN KEHUTANAN DI TAHUN 3. PROV SEGERA MENETAPKAN NSPK P3D 	PEMBIAYAAN PELAKSANAAN REHABILITASI DILUAR KAWASAN HUTAN NEGARA, PERLINDUNGAN HUTAN LINDUNG DAN HUAN PRODUKSI, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENYULUHAN KEHUTANAN DI TAHUN 2015 MASIH DIBIYAI APBD KAB. BANGKA
PERTAMBANGAN	INSPEKTUT DAN CALON INSPEKTUR 6 ORG, DOKUMEN 287 IUP SELUAS 105.106,26 HA, JAMINAN REKLAMASI RP. 20.080.348.764,28	<ol style="list-style-type: none"> 1. PROVINSI SEGERA MENETAPKAN NSPK P3D YANG DISERAHKAN 2. PENGAWASAN PERTAMBANGAN DIMASA TRANSISI TETAP OLEH KABUPATEN 3. BENTUK UPT/KPHP 	PEMBIAYAAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN DIMASA TRANSISI TAHUN 2015 MASIH DIBIYAI APBD KAB. BANGKA

URUSAN	INVENTARISASI P3D	SARAN	KETERANGAN
KELAUTAN	PENYUHUH 7 ORG, PERALATAN DAN DOKUMEN KELAUTAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. PROV SEGERA MENETAPKAN NSPK P3D 2. PENGAWASAN LAUT HARUS SEGERA DAN KORDINATIF 3. RZWP3K PROV SEGERA DITETAPKAN 4. PEMBIAYAAN KELAUTAN OLEH PROVINSI 2016 5. UPTD KELAUTAN 	PEMBIAYAAN RZWP3K, PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI DAN INVENTARISASI POTENSI PESISIR DAN PUAU-PULAU KECIL OLEH APBD KAB. BANGKA TAHUN 2015
PENDIDIKAN MENENGAH	DALAM PROSES INVENTARISASI TENAGA PENDIDIK, SARANA PRASARANA DAN DOKUMEN	<ol style="list-style-type: none"> 1. PROV SEGERA MENETAPKAN NSPK P3D 2. TENAGA KEPENDIDIKAN (TU, ADMINISTRASI) TIDAK DISERAHKAN KE PROVINSI 3. UPTD DIKMEN 4. PENGATURAN MEKANISME P3D YANG DILAKSANAKAN DI APBD KAB 2016 	PEMBIAYAAN PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN 2015 DIBIYAI APBD KAB BANGKA



URUSAN	INVENTARISASI P3D	SARAN	KETERANGAN
PERHUBUNGAN	TIDAK ADA P3D TERKAIT TERMINAL TYPE A DAN B (RENCANA PEMBANGUNAN TERMINAL TYPE A ATAU B DI AIR RUAY)	PROVINSI SEGERA MEMBERIKAN KEPASTIAN TERKAIT PEMBANGUNAN TERMINAL TYPE A ATAU B DI AIR RUAY	SELURUH TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TERMINAL TYPE B SUDAH DISELESAIKAN PEMKAB BANGKA TAHUN 2014 (LAHAN, MASTERPLAN, DED)
TENAGA KERJA	PENGAWAS KETENAGA KERJAAN 3 ORG, DOKUMEN PENGAWASAN DAN K3 287 PERUSAHAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1.PROV SEGERA MENETAPKAN NSPK P3D 2.PENGATURAN KELEMBAGAAN DI KAB/KOTA 3.PEMBIAYAAN PENGAWASAN DAN K3 TAHUN 2016 OLEH APBD PROV 	PEMBIAYAAN PENGAWASAN DAN K3 TAHUN 2015 OLEH APBD KAB BANGKA





URUSAN	INVENTARISASI P3D	SARAN	KETERANGAN
KELUARGA BERENCANA	1 ORANG PLKB, 3 BALAI PENYULUH KB (PEMALI, SUNGAILIAT DAN MENDO BARAT) DAN DOKUMEN	1. PROVINSI SEGERA MENETAPKAN NSPK,, 2. PEMBIAYAAN KEGIATAN THN 2016 OLEH APBD PROVINSI	PEMBIAYAAN KEGIATAN TAHUN 2015 OLEH APBD KAB. BANGKA
PERDAGANGAN	PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL BERUPA TERA, TERA ULANG DAN PENGAWASAN DARI PROVINSI KE KAB/KOTA	1. PELIMPAHAN P3D KEMETROLOGIAN PROVINSI KE KABUPATEN BANGKA 2. DABA 2016-2017 UNTUK PERALATAN KEMETROLOGIAN 3. PROVINSI MEMBERIKAN DIKLAT DAN PEMBINAAN REGULER 4. PERGUB MENGATUR KEMETROLOGIAN DI MASA TRANSISI	1. KABUPATEN BANGKA BELUM MEMIIKI PETUGAS KEMETROLOGIAN DAN PPNS-NYA 2. BELUM MEMILIKI PERALATAN KEMTEROLOGIAN 3. HARGA PERALATAN METROLOGI YANG TINGGI



REKOMENDASI UMUM

- ❖ **KEWENANGAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN KHUSUS DILIMPAHKAN KE PROVINSI: KONSEKUENSINYA SELURUH SUMBERDAYA, TERMASUK ANGGARAN, SDM, ASSET DLL, MENJADI KEWENANGAN PROVINSI. IMPLIKASINYA KAPASITAS PROVINSI HARUS LEBIH KUAT KARENA PENDIDIKAN MERUPAKAN PELAYANAN DASAR DIMANA KUALITAS SDM PROVINSI SANGAT TERGANTUNG PADA KUALITAS PENDIDIKAN INI.**
- ❖ **KEWENANGAN KELAUTAN, KEHUTANAN (KECUALI TAHURA) DAN PERTAMBANGAN JUGA DILIMPAHKAN KE PROVINSI. KONSEKUENSINYA KAPASITAS PROVINSI HARUS LEBIH KUAT, KARENA SELURUH SUMBERDAYA JUGA DIKELOLA PROVINSI, NOMENKLATUR SKPD KAB/KOTA BERPELUANG UNTUK MENGALAMI PERUBAHAN, MENYESUAIKAN DENGAN KEWENANGAN YANG BARU.**

- ❖ **PEMROV HARUS SEGERA MEMPERSIAPKAN DIRI, MENYIAPKAN SELURUH INSTRUMEN DAN PERANGKAT PERALIHAN KEWENANGAN. KECEPATAN PROVINSI AKAN SANGAT MEMPENGARUHI KECEPATAN DAN KUALITAS PEMBANGUNAN KAB/KOTA, TERUTAMA PADA KEWENANGAN-KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN**
- ❖ **PEMROV SEGERA DAN INTENSIF BERKOMUNIKASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT UNTUK SEGER MENERBITKAN DALAM PP YANG MENGATUR KELEMBAGAAN PEMERINTAH PROPINSI, KABUPATEN/KOTA SERTA NOMENKLATUR KELEMBAGAAN YANG DISESUAIKAN DENGAN LUAS WILAYAH, BESARNYA JUMLAH PENDUDUK DAN BESAR ANGGARAN**

- ◉ SELURUH KOMPONEN DI PEMPROV DAN PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA UNTUK SEGERA MENGINVENTARISASI PRODUK HUKUM DAERAH YANG PERLU DISESUAIKAN SEBAGAI IMPLIKASI TERBITNYA UU NO 23/2014 DAN SEGERA DITETAPKAN PRODUK HUKUM BARUNYA
- ◉ DALAM MASA TRANSISI, PEMPROV SEGERA MENETAPKAN PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) UNTUK MENGATUR PELAYANAN PUBLIK TERKAIT PELIMPAHAN KEWENANGAN, SEHINGGA MASA PERALIHAN INI TAK AKAN MENGHENTIKAN DAN MENGGANGGU PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT, KHUSUSNYA DI BIDANG PERTAMBANGAN DAN ESDM, KEHUTANAN, KELAUTAN, PENDIDIKAN MENENGAH DAN KEMETROLOGIAN
- ◉ PEMPROV HARUS RASIONAL MENGUKUR KAPASITAS KELEMBAGAAN PROV DALAM MENGELOLA PELIMPAHAN KEWENANGAN. KEWENANGAN YANG TERASA BERAT DILAKSANAKAN PROVINSI, DAPAT DIBERIKAN KEPADA KAB/KOTA DAN DESA MELALUI TUGAS PERBANTUAN.



SEKIAN
TERIMA KASIH...

